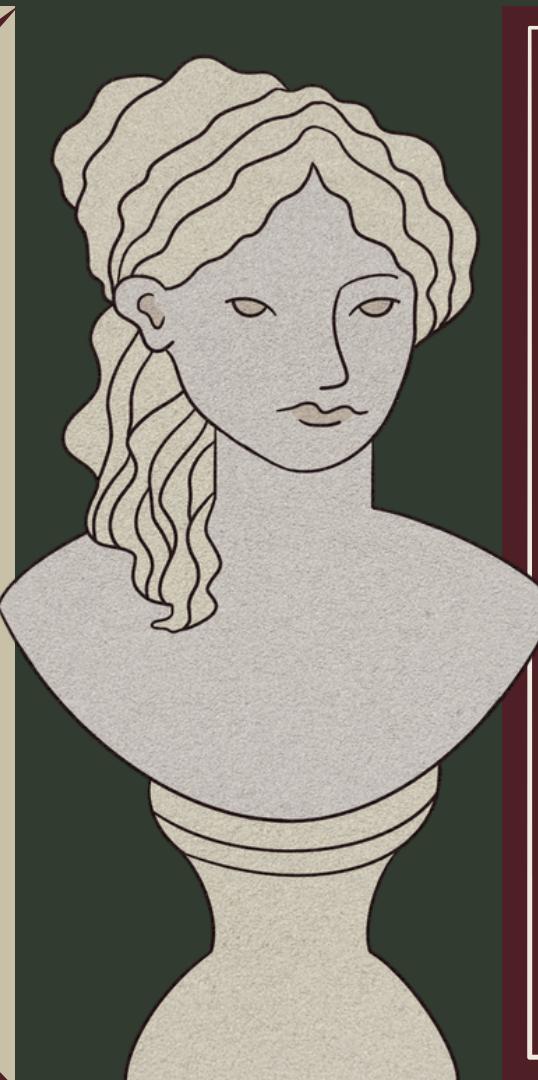
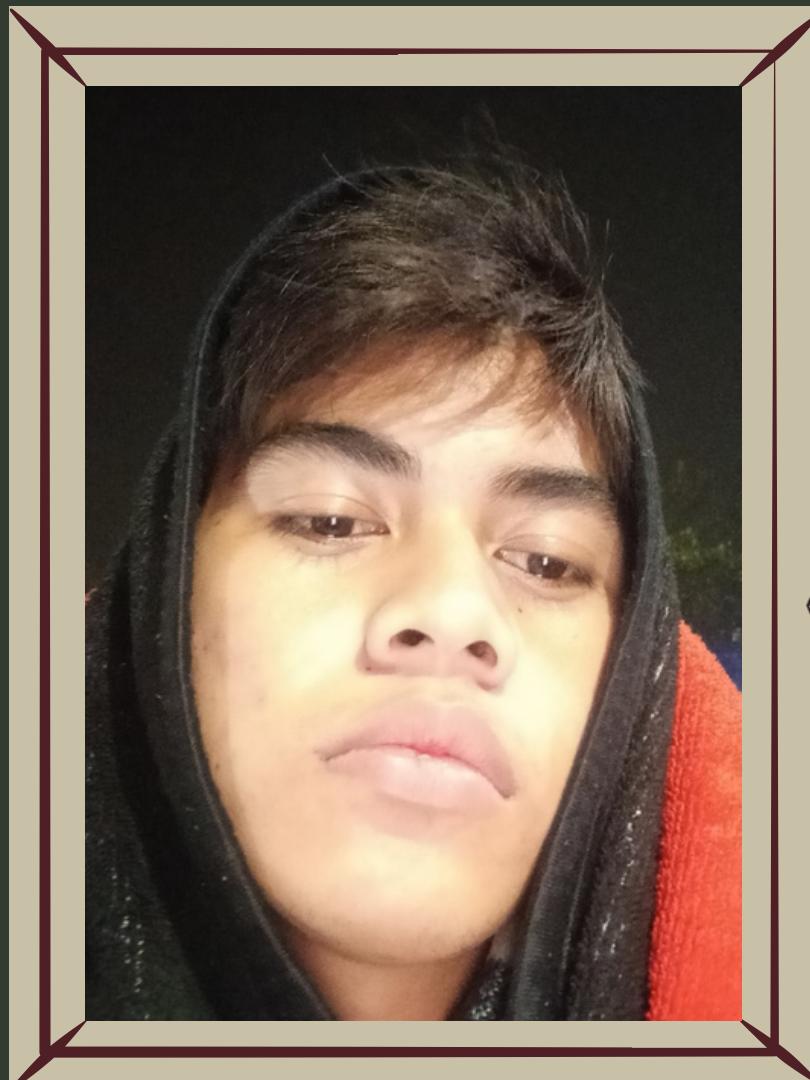




Pelaksanaan
HAM Dalam UUD
RI 1945



**Luqman
Ananta A. H.**
2341720077



**Michelle
Dorani S.**
2341720113



**Moh Angga
Tegar P.**
2341720036

Anggota

Apa itu HAM?



Seperangkat hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia

- UU No 39/1999



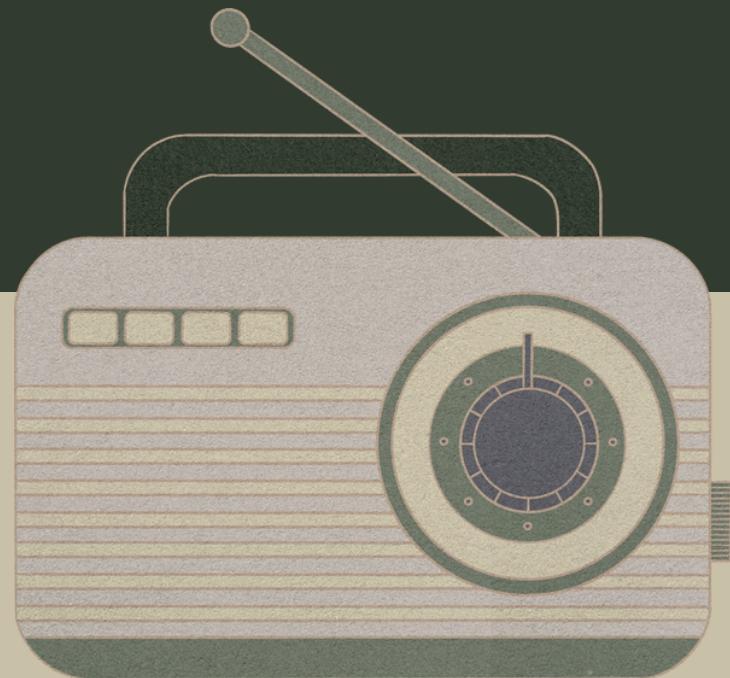
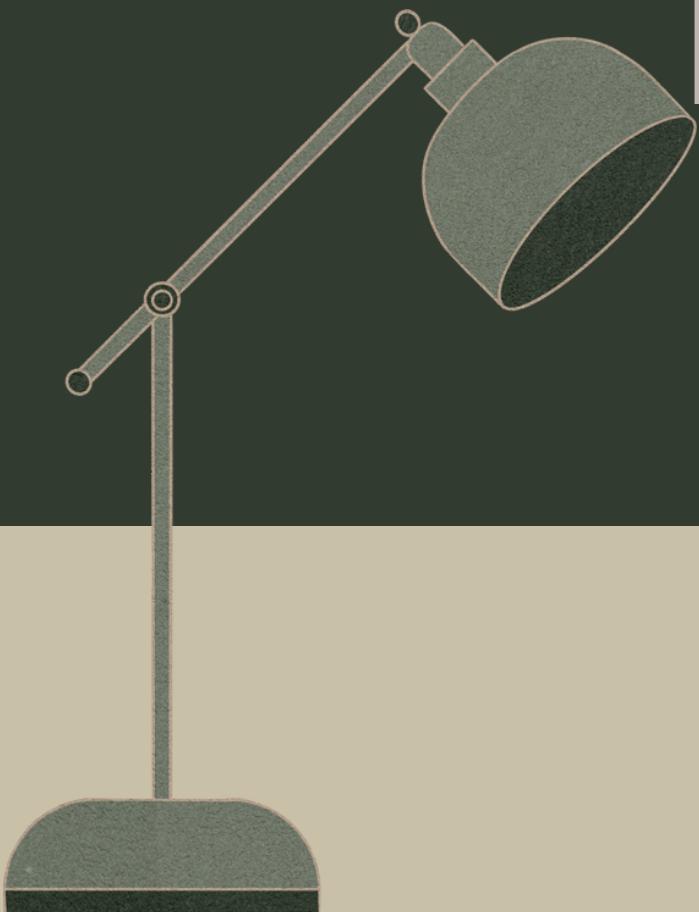
Hubungan UUD 45 Dengan HAM

Dalam UUD ini, terdapat pasal-pasal yang mengakui, melindungi, dan mengatur HAM, mencakup hak-hak seperti kehidupan, kebebasan beragama, kesetaraan di depan hukum, dan perlindungan diri pribadi. UUD 1945 juga menjadi landasan bagi pendirian lembaga-lembaga HAM, pengaturan hukum dan peraturan yang berkaitan dengan HAM, sistem peradilan untuk menangani pelanggaran HAM, serta kerangka prinsip-prinsip HAM.



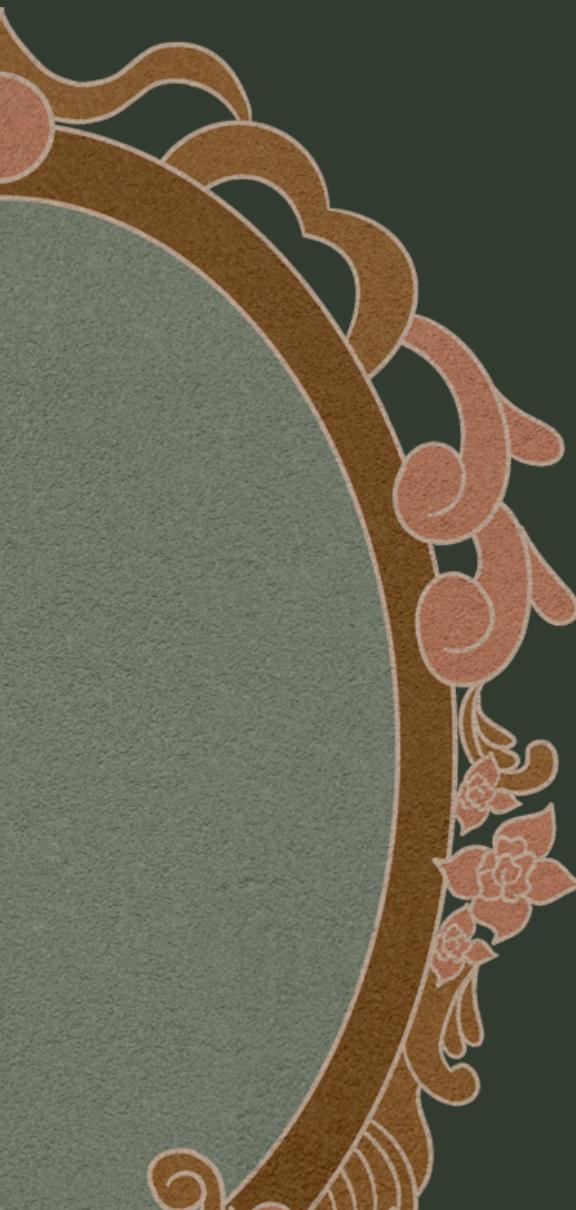
Perkembangan HAM

Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia telah mengalami sejumlah perkembangan signifikan sejak pembentukan UUD 1945. Beberapa tahapan perubahan dalam perlindungan HAM meliputi:



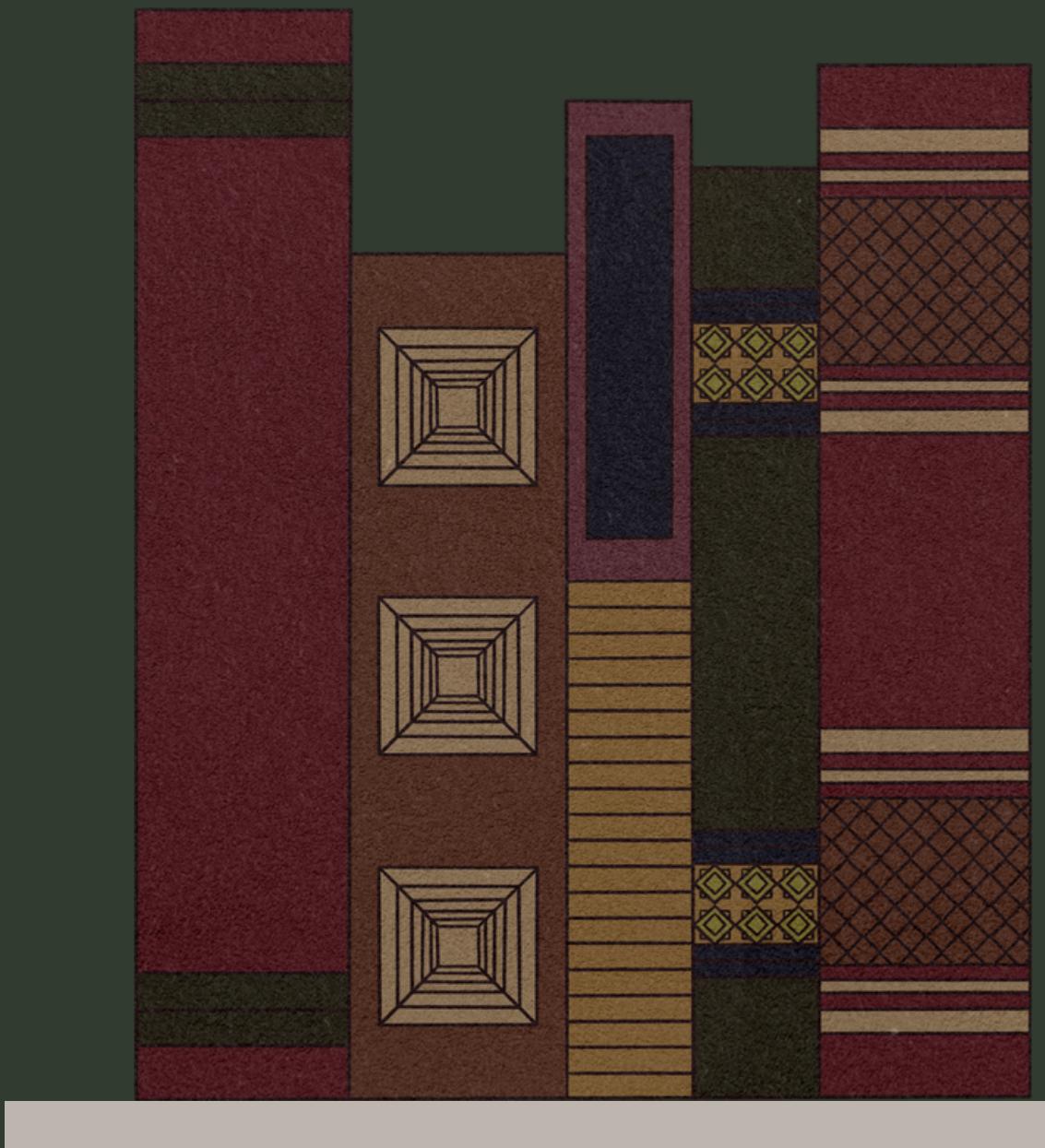
1. Pembentukan UUD 1945

Ketika Indonesia meraih kemerdekaan pada tahun 1945, UUD 1945 menjadi landasan hukum utama negara yang juga mengakui HAM. Meskipun pasal-pasal awalnya tidak secara rinci menyebutkan HAM, prinsip-prinsip HAM tersirat dalam konstitusi ini.



2. Amandemen UUD 1945

Seiring berjalananya waktu, terdapat serangkaian amandemen terhadap UUD 1945. Amandemen tersebut bertujuan untuk memperkuat perlindungan HAM. Misalnya, Amandemen ke-4 tahun 2002 secara khusus menambahkan Pasal 28I-28J yang secara eksplisit mengatur tentang HAM.



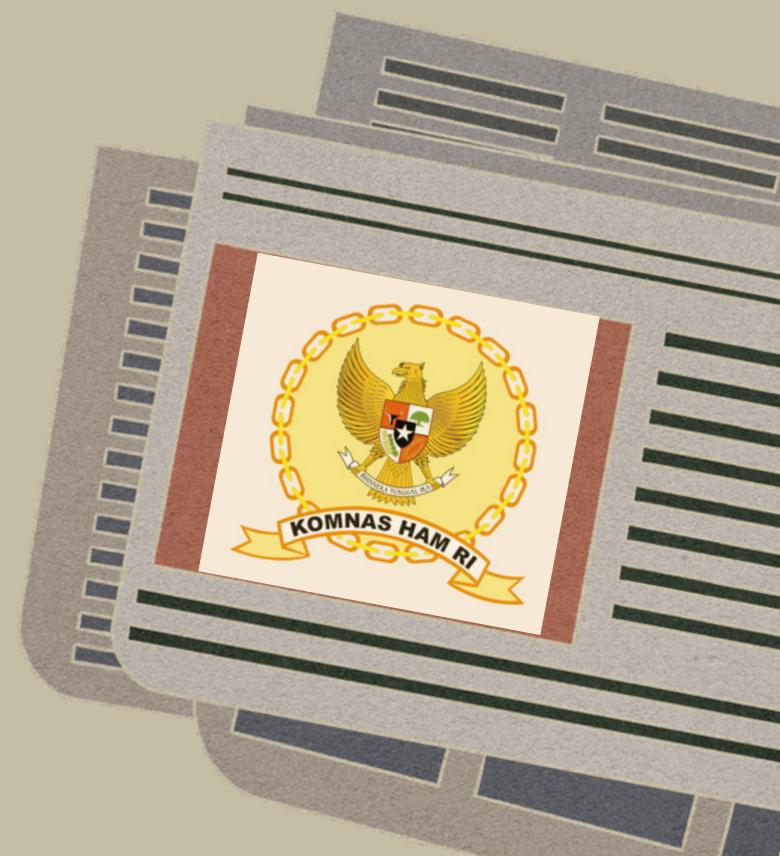
3. Pengesahan Deklarasi Universal HAM

Indonesia telah menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan telah meratifikasi Deklarasi Universal HAM. Hal ini mengindikasikan komitmen Indonesia untuk mematuhi standar internasional dalam perlindungan HAM.



4. Pembentukan dan Peran Komnas HAM

Didirikan pada tahun 1993, Komisi Nasional HAM (Komnas HAM) menjadi lembaga penting dalam mengawasi, melindungi, dan mempromosikan HAM di Indonesia.



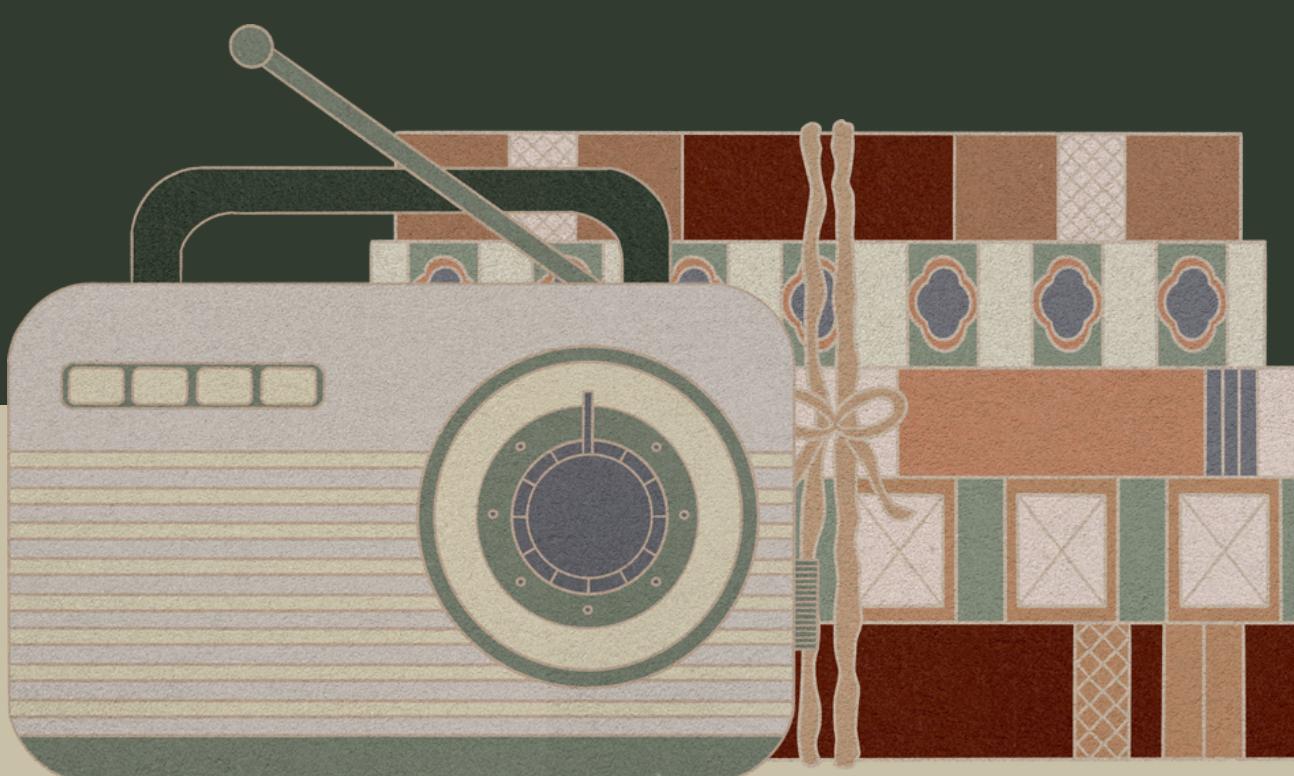
5. Ratifikasi Konvensi Internasional HAM



Indonesia telah meratifikasi berbagai konvensi internasional yang berkaitan dengan HAM, seperti Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (CERD), Konvensi Hak Anak (CRC), dan lain sebagainya.

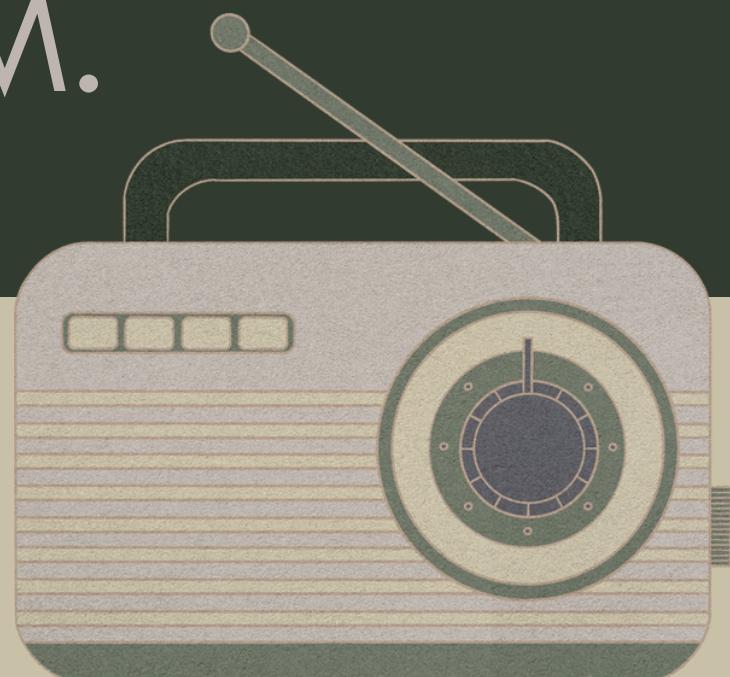
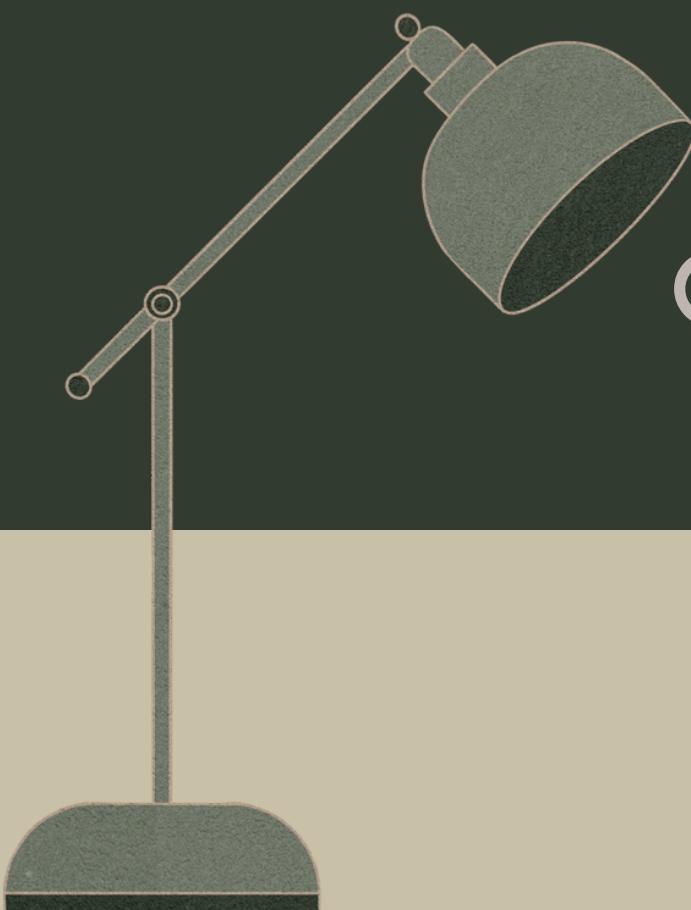
6. Kasus-Kasus Pelanggaran HAM dan Peradilan Internasional

Beberapa kasus pelanggaran HAM di Indonesia telah dihadirkan ke pengadilan nasional maupun internasional. Hal ini mengindikasikan perhatian global terhadap perlindungan HAM di Indonesia.

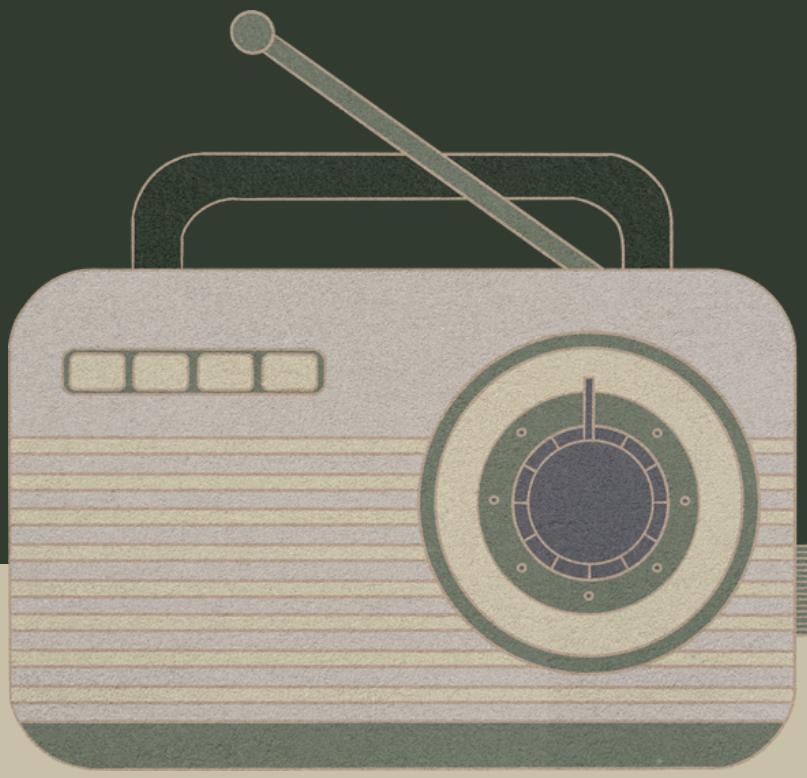


7. Peningkatan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat

Masyarakat Indonesia semakin sadar akan hak-hak mereka dan semakin aktif dalam menuntut perlindungan HAM, baik melalui aksi-aksi langsung, kegiatan advokasi, maupun partisipasi dalam berbagai forum terkait HAM.

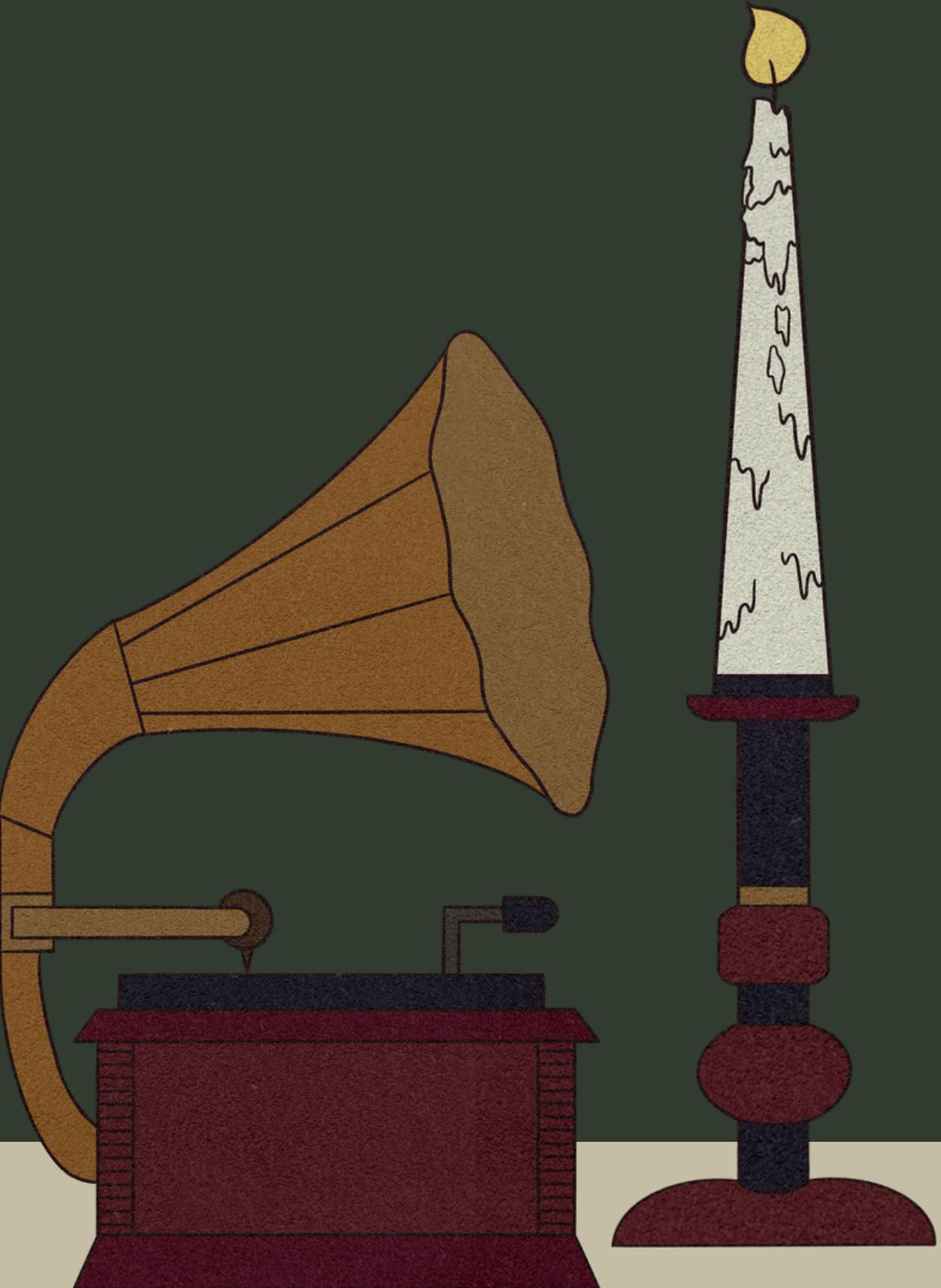


Pelaksanaan HAM dengan UUD 45

- 
- 
1. Pasal-pasal UUD 1945
 2. Lembaga & Komisi HAM
 3. Pengadilan
 4. Hukum dan Peraturan
 5. Pendidikan & Kesadaran HAM

Pasal Khusus HAM

- Pasal 28A
- Pasal 28B
- Pasal 28C
- Pasal 28D
- Pasal 28E
- Pasal 28F
- Pasal 28G
- Pasal 28H
- Pasal 28I
- Pasal 28J



Pasal-Pasal

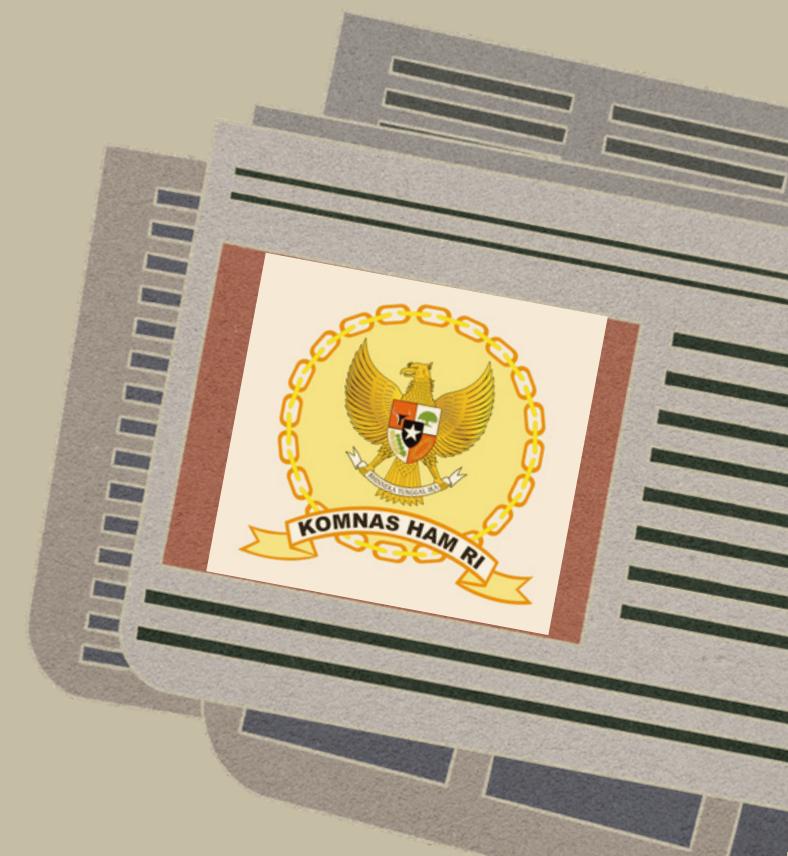
- Pasal 27 Ayat 1 dan 2
- Pasal 29 Ayat 2
- Pasal 30 Ayat 1
- Pasal 31 Ayat 1
- Pasal 33 Ayat 1
- Pasal 34 Ayat 1 dan 2



Lembaga HAM

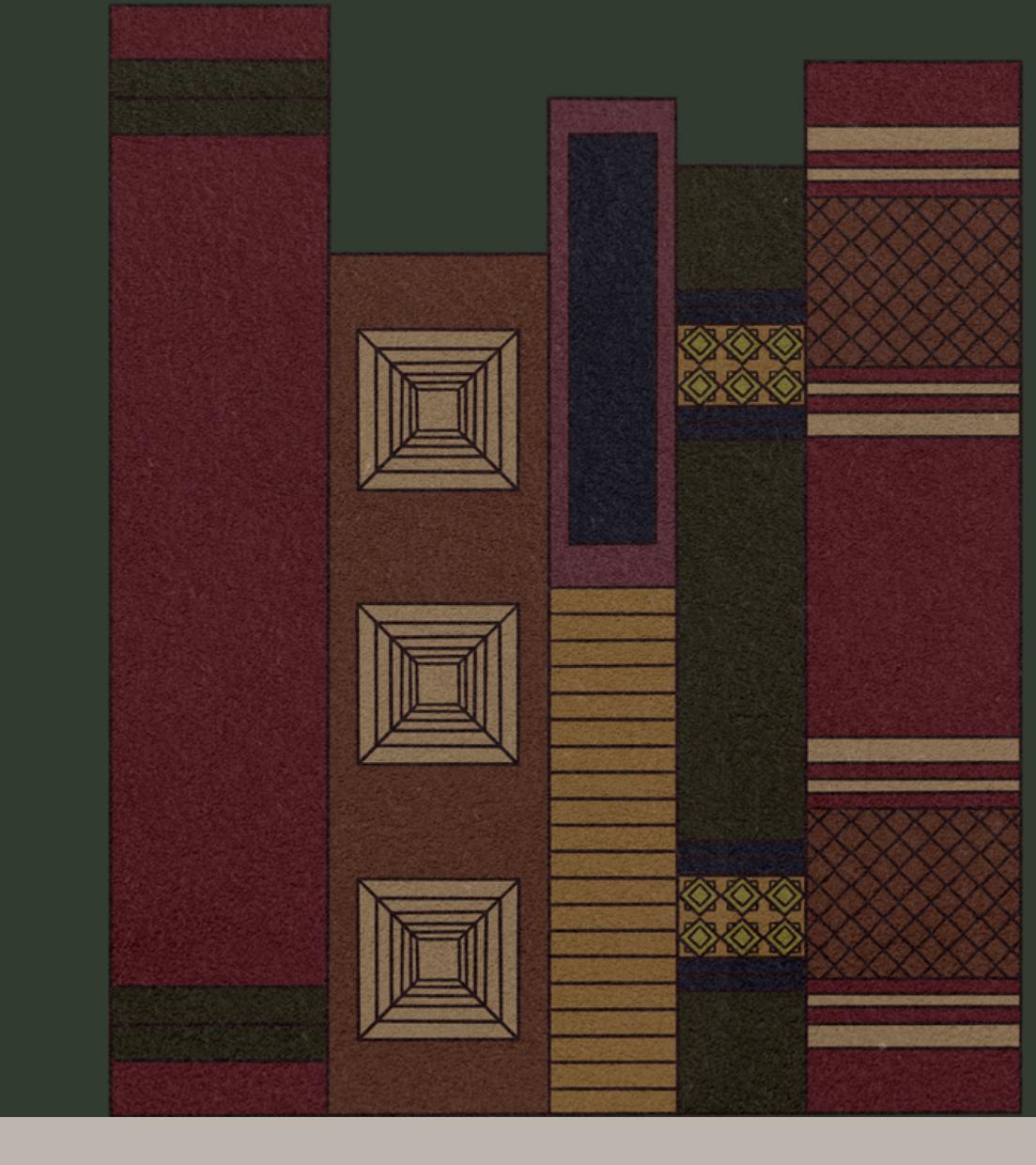
Komnas HAM

UUD 1945 memberikan landasan hukum untuk pendirian lembaga-lembaga seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Komnas HAM memiliki tugas utama memantau, melindungi, dan mempromosikan HAM di Indonesia. Mereka menyelidiki pelanggaran HAM, memberikan rekomendasi kepada pemerintah, dan mengadvokasi prinsip-prinsip HAM.



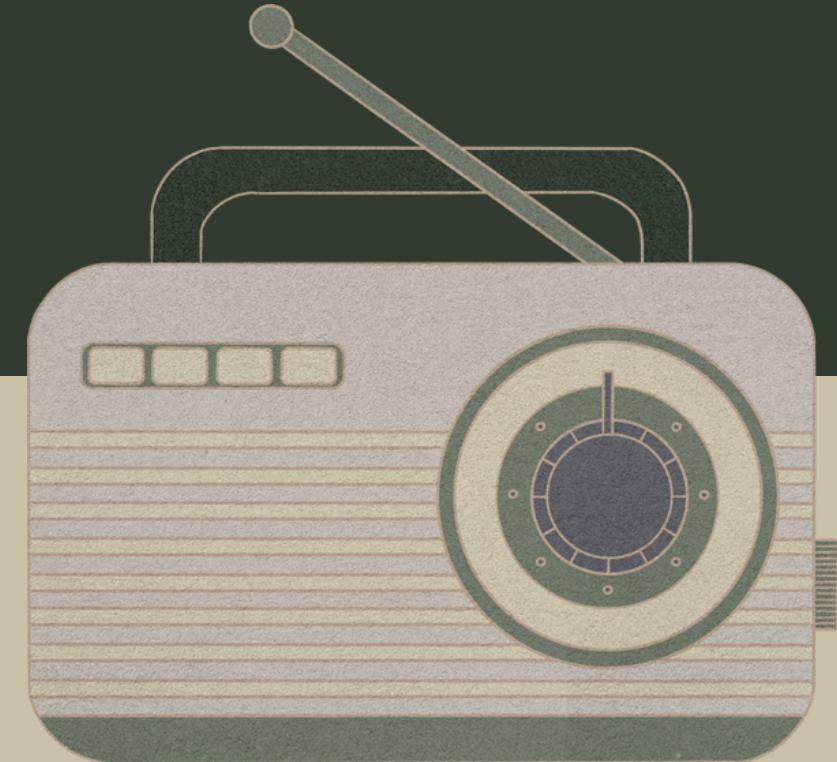
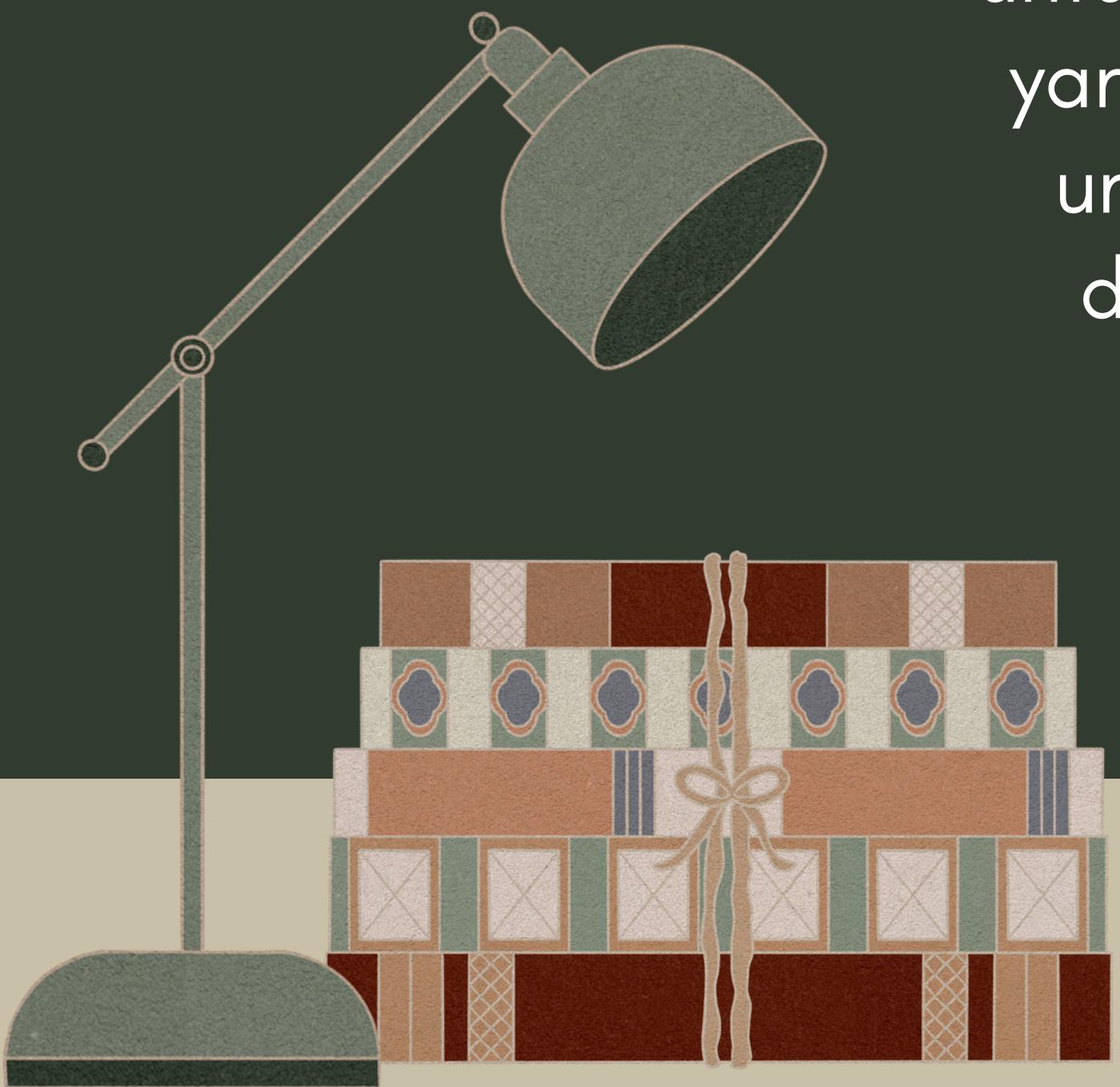
Pengadilan

UUD 1945 membentuk sistem peradilan yang dapat menangani pelanggaran HAM. Mahkamah Konstitusi Indonesia memiliki peran penting dalam memastikan bahwa undang-undang yang ada sesuai dengan UUD 1945. Mahkamah Konstitusi dapat memeriksa dan memutuskan kasus yang melibatkan HAM dan menguji kesesuaian undang-undang dengan prinsip-prinsip HAM yang terkandung dalam UUD 1945.



Hukum dan Peraturan

UUD 1945 memberikan otoritas kepada pemerintah untuk mengeluarkan undang-undang dan peraturan yang mengatur isu-isu HAM. Ini mencakup undang-undang yang mendefinisikan hak anak, hak buruh, dan hak perempuan, yang memperkuat kerangka kerja HAM di Indonesia.



Pendidikan dan Kesadaran HAM



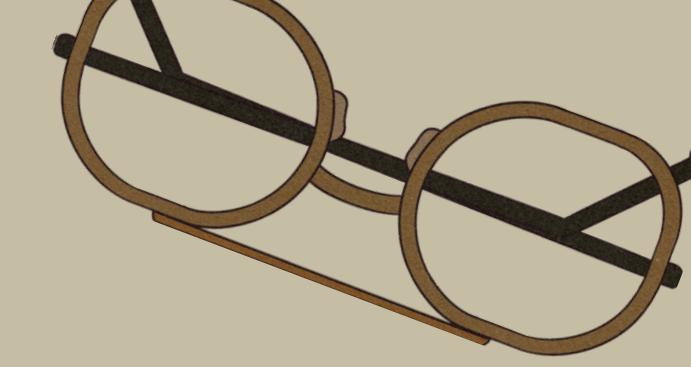
UUD 1945 mencerminkan komitmen Indonesia untuk meningkatkan kesadaran HAM di antara warganya.

Pendidikan tentang HAM mencakup program-program yang ditujukan untuk menyampaikan pengetahuan tentang HAM kepada masyarakat.



Kesadaran HAM adalah bagian penting dalam upaya untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip HAM dihayati dan dihormati dalam masyarakat Indonesia.

Kesimpulan



Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia telah berkembang seiring waktu, dengan amandemen UUD 1945 yang memperkuat kerangka HAM, partisipasi dalam organisasi internasional, dan upaya meningkatkan kesadaran HAM. Kerja sama antara pemerintah, lembaga HAM, masyarakat sipil, dan individu adalah kunci dalam memastikan penghormatan, perlindungan, dan promosi HAM sesuai dengan UUD 1945 dan standar internasional.

TERIMA KASIH

